



Policy Brief

Akselerasi Pembangunan Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi

Oleh :

Dr. UNTUNG, S.Kom.,M.M.

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda Kab Mesuji

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks. Ketimpangan pembangunan masih terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, bahkan antar-kecamatan dalam satu kabupaten, yang berimplikasi pada kesenjangan akses layanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk anggaran, kapasitas sumber daya manusia, maupun penguasaan teknologi, turut membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengeksekusi program pembangunan yang berdaya saing. Di sisi lain, daya saing daerah relatif masih rendah, ditandai dengan lemahnya inovasi lokal, keterhubungan pasar yang terbatas, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan global, termasuk digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.

Dalam konteks tersebut, **inovasi daerah** bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat transformasi pembangunan. Inovasi dapat menghadirkan solusi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya, serta penciptaan peluang ekonomi baru. Namun, inovasi tidak dapat berdiri sendiri; keberhasilannya sangat bergantung pada **kolaborasi lintas sektor**. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, akademisi, komunitas masyarakat, media, serta pemerintah pusat. Kolaborasi pentahelix ini menjadi motor utama dalam memperkuat ekosistem inovasi, mengakselerasi pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap proses pembangunan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan demikian, kombinasi antara inovasi dan kolaborasi yang terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil akan menjadi kunci untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang **berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan**.

2. Permasalahan Utama

- a) Keterbatasan Anggaran
Banyak daerah bergantung pada transfer pusat, sementara PAD masih rendah.
- b) Kurangnya Sinergi
Program pembangunan antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sering berjalan sektoral.
- c) Rendahnya Pemanfaatan Inovasi
Inovasi daerah belum diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan.
- d) Partisipasi Publik dan Dunia Usaha Minim
Kolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta belum optimal.

3. Tujuan Kebijakan

- Mendorong inovasi sebagai instrumen utama pembangunan.
- Memperkuat kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media).
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

4. Opsi Kebijakan

1. Optimalisasi Regulasi dan Insentif

- Mendorong perda dan perbup/perwali yang mendukung ekosistem inovasi.
- Memberikan insentif bagi OPD, masyarakat, maupun dunia usaha yang berinovasi.

2. Penguatan Kolaborasi Pentahelix

- Membangun jejaring dengan akademisi, swasta, komunitas, media, dan pemerintah pusat.
- Mengembangkan forum inovasi daerah sebagai wadah berbagi praktik baik.

3. Digitalisasi dan Tata Kelola Data

- Membangun platform digital untuk integrasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
- Pemanfaatan big data dan AI untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

4. Replikasi dan Skalabilitas Inovasi

- Mendorong adopsi inovasi antar-daerah.
- Membangun pusat inovasi daerah (innovation hub).

5. Rekomendasi Strategis

- a) Integrasikan Inovasi dalam RPJMD dan RKPD – agar setiap program pembangunan memiliki aspek inovatif.
- b) Bangun Mekanisme Kolaborasi Formal – melalui MoU, forum kolaborasi, hingga kemitraan publik-swasta.
- c) Perkuat Kapasitas SDM – pelatihan inovasi birokrasi, digital governance, dan kepemimpinan kolaboratif.
- d) Terapkan Monitoring dan Evaluasi Inovasi – dengan indikator kinerja inovasi daerah.
- e) Dorong Partisipasi Publik – melalui co-creation kebijakan dan inovasi sosial.

6. Dampak yang Diharapkan

- Percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
- Efisiensi penggunaan anggaran melalui inovasi.
- Terbangunnya budaya kolaborasi lintas sektor.
- Meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

7. Kesimpulan

Akselerasi pembangunan daerah membutuhkan inovasi yang berkelanjutan serta kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan. Dengan komitmen bersama, inovasi dan kolaborasi dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing tinggi.